

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Spanyol termasuk salah satu negara di kawasan Eropa Barat, berbatasan dengan Prancis di sebelah utaranya dan Portugal di sebelah baratnya. Spanyol berdiri dengan bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional atau Kerajaan dengan undang – undang yang telah disepakati sebagai aturan bagi rakyat dan menjadi pengatur serta batasan untuk setiap tindakan Raja. Meskipun bentuk pemerintahannya Monarki, Spanyol menganut sistem demokrasi karena mengalami pergantian atau transisi sistem pemerintahan beberapa kali. Sebelum pergantian sistem pemerintahan tersebut, Spanyol tetap berbentuk Monarki dan kekuasaan berpusat pada Raja, namun adanya peristiwa *Second Republic* (1931 – 1936), perang sipil serta perubahan signifikan pada masa berakhirnya pemerintahan Jenderal Franco yaitu seorang diktator dalam era pemerintahannya menyebabkan transisi sistem pemerintahan menjadi demokrasi.

Catalunya atau *Catalonia* merupakan salah satu wilayah otonom Spanyol yang berada di timur laut Iberia Semenanjung dan telah menjadi bagian dari Spanyol sejak abad ke-15.¹ Catalonia memiliki banyak hubungan dengan kawasan Mediterania dan Eropa Kontinental yang membuat posisinya cukup strategis.

¹ Ignatius Hubert, Windy Dermawan dan Akim Akim, *Catalan Identity and Paradiplomacy Strategy in Catalonia's Independence Movement*, Jurnal Politik Internasional, Vol, 22 No, 2 (2020), Bandung: Universitas Padjadjaran, hal. 318.

Wilayah Ibu Kota Catalonia yaitu Barcelona juga sangat terkenal di dunia Sepakbola Internasional. Identitas pertama catalunya berasal dari Spanyol dengan ditandai oleh pernikahan Pangeran Barcelona dan Putri Aragon Petronella. Pada abad ke-17, Raja Felipe IV membuat kebijakan terpusat, yang menyebabkan perlawanan masyarakat Catalunyya dari tahun 1640 hingga 1659. Dilanjut pada awal abad ke-20, Franco menerapkan pemerintahan yang lebih represif dimana hak kolektif Catalan dihapus, larangan menggunakan bahasa Catalunya, serta menghapus semua lembaga pemerintahan untuk mengakhiri regionalisme Spanyol. Setelah masa kepemimpinan Jenderal Franco berakhir pada tahun 1975, perlawanan terhadap pemerintah mulai muncul.

Permulaan referendum pada tahun 2006 membuat masyarakat Catalunya memilih untuk mendirikan suatu negara sendiri dengan tujuan untuk memperluas statuta otonomi. Regulasi yang mendasari paradiplomasi di Catalunya terdapat dalam *Statue 2006* mengenai pembagian kewenangan antara pusat dengan Catalonia sebagai *autonomus community*.² Dalam hal ini, pemerintah pusat Spanyol menjadi subjek hukum internasional dan perjanjian internasional, sedangkan Catalunya diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri secara internal maupun eksternal. *Statue 2006* yang juga sebagai pilar *paradiplomatic affairs* mengakui aktifitas resmi paradiplomasi oleh Catalonia.

Pada tahun 2010, nasionalisme Catalan muncul sebagai akibat dari referendum tersebut yang akhirnya mendorong pemerintah Spanyol untuk

² Takdir Ali Mukti, 2020, *Politik Paradiplomasi dan isu Kedaulatan di Indonesia*, Yogyakarta: The Phinisi Press, hal. 194

mencabut reformasi undang-undang yang berlaku.³ Pada tahun tersebut, Mahkamah konstitusi Spanyol membuat keputusan yang menetapkan batasan-batasan terhadap statuta otonomi Catalonia yang sekaligus menjadi landasan hukum baru di wilayah otonom tersebut. Keputusan ini menimbulkan eskalasi konflik dalam masyarakat dan parlemen Catalonia karena dianggap menghambat cita-cita Catalonia untuk merdeka. Sehingga terjadi unjuk rasa yang sangat besar yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah Catalan yaitu *Omnium Cultural* dengan slogan utama mereka “*we are nation, we decided*”.⁴

Artur Mas dilantik pada tahun yang sama saat eskalasi terjadi. Presiden *Generalitat* pada saat itu, Arthur Mas yang juga sebagai *Secessionist*, meletakkan kewenangan paradiplomasi dalam kekuasaannya kemudian membentuk sekretariat yang menyusun kebijakan aksi luar negeri selama lima tahun. Pada saat itulah *Foreign Action Plan* (FAP) 2010-2015 dibuat berdasarkan wewenang yang sudah diperluas dan tidak sesuai dengan kaidah tertulis dalam *Statute 2006*. Desain paradiplomasi secara fundamental telah diubah dari peraturan semula, sehingga dalam praktiknya lebih mencerminkan aspirasi pemimpin yaitu *Presiden Generalitat* daripada aspirasi Catalonia sebagai bagian dari Spanyol. Pada 2013, Artur Mas membuat keputusan presiden kembali dengan membentuk *Secretariat of Foreign Affairs of the European Union* yang ditempatkan langsung dibawah Presiden dengan kewenangan yaitu: arahan umum hubungan luar negeri, arahan umum urusan multilateral dan Eropa, arahan umum kerjasama pembangunan,

³ Dwiki Puspita S, 2021, *Peran dan Fungsi Uni Eropa dalam Perkembangan Kasus Referendum Kemerdekaan Catalunya (2014 – 2019)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, hal. 1.

⁴ Adam Muslihat S, 2020, *Faktor-Faktor Kegagalan Independensi Catalonia dari Spanyol*, Skripsi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

sebagai delegasi dari Generalitat di Uni Eropa, delegasi pemerintah Catalonia di luar negeri, subarah umum untuk program koordinasi dan manajemen.⁵

Strategi yang dipromosikan oleh Pemerintah Catalonia dalam *Foreign Action Plan 2010-2015* merupakan strategi internal pertama yang secara khusus dirancang untuk memperluas strategi diplomasi publik secara terang-terangan, teratur dan sistematis.⁶ Sebelum dibentuknya FAP ini, pemerintah Catalonia sendiri belum pernah membuat kebijakan aksi dengan tenggat waktu yang ditentukan, sehingga adanya FAP ini menjadi suatu target yang harus dicapai oleh pemerintahan. Pergeseran paradiplomasi di Catalonia cenderung menuju pada promosi identitas dan nasionalisme Catalan yang lebih terpolitisasi, mengingat identitas Catalunya sendiri sangat khas dan berbeda dengan daerah bagian Spanyol lainnya. Adanya penolakan pemerintah Spanyol sendiri terhadap *Action Plan* Catalonia, membuat FAP 2010-2015 tidak memenuhi target dan kemudian diperpanjang lagi menjadi FAP 2015-2020.

Selain menetapkan kebijakan luar negeri melalui *Action Plan*, Artur Mas juga berperan penting dalam pengadaan referendum tahun 2015 dengan klaim bahwa hasil pemilihan umum tersebut mampu menciptakan status *de facto* bagi kemerdekaan Catalonia.⁷ Permasalahan referendum Catalunya merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. aktor-aktor yang mempengaruhi hasil referendum tersebut melibatkan banyak aspek, termasuk partai nasionalis pro

⁵ Takdir Ali Mukti, 2017, *Paradiplomacy dan Konflik Hukum di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 95-96

⁶ Jordi de San E.V. dan Jordi Xifra, *International Representation Strategies for Stateless Nations: The Case of Catalonia's Cultural Diplomacy, Place Branding and Public Diplomacy*, Vol, 11, No, 1 (2014), Barcelona Spain: Macmillan Publisher, hal. 87.

⁷ Adam Muslihat S, 2020, *Faktor-Faktor Kegagalan Independensi Catalonia dari Spanyol*, Skripsi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, hal 7

kemerdekaan yang terus menyuarkan kebebasan dan mencari aliansi serta dukungan dari pihak eksternal, terutama dari pihak Uni Eropa.

Gerakan nasionalis Catalan dan peran partai politik didalamnya yang mengagas kemerdekaan Catalonia pada 2017 lalu dengan mengangkat konsep “*Europe of The Regions*” yang mengacu pada gagasan otoritas regional dan lokal menjadi salah satu aktor dan bagian dalam Uni Eropa menjadi suatu isu yang kompleks. Catalunya berharap Uni Eropa mendukung gerakan tersebut dengan berdasarkan pada gagasan ini.⁸ Referendum tahun 2017 dibawah kepemimpinan Carles Puigdemont menjadi puncak ketegangan politik antara Catalonia dengan Spanyol sehingga Madrid terpaksa memberlakukan pemerintahan langsung untuk menghalangi upaya kemerdekaan Catalonia kala itu. Terdapat banyak hal tidak terduga yang terjadi setelah referendum 2017 sehingga mempersulit upaya pemerintah Generalitat untuk melakukan aktivitas paradiplomasi.⁹

Gerakan nasionalis di Catalonia memiliki latar belakang yang cukup panjang di Spanyol, disamping adanya partai nasionalis ada banyak gerakan separatisme yang terjadi di Spanyol, namun wilayah Catalunya menjadi yang paling keras dalam menyuarkan pemisahan diri. Dikarenakan tindakan keras yang dilakukan, pemerintah Spanyol mengambil tindakan diskriminatif yang menjadi salah satu alasan kuat bagi catalunya untuk memisahkan diri. Disamping dukungan masyarakat Catalunya,

⁸ Fleur Schepers, 2018, *The Catalan Nationalist Movement and the Idea of “Europe of the Regions” : a way to bypass the nation state?*, Tesis, Utrecht: MA International Relations in Historical Perspective, Utrecht University Nederlands, Hal. 1.

⁹ BBC, 2019, *Catalonia’s bid for independence from Spain explained*, diakses dalam <https://www.bbc.com/news/world-europe-29478415> pada 16 Januari 2025

pemisahan ini didukung oleh pemerintah otonom Catalunya yang didukung oleh partai pro kemerdekaan yang berhasil menguasai parlemen Catalunya.¹⁰

Hubungan antara pemerintah Spanyol dan pemerintah Catalunya juga merupakan faktor penting dalam kegagalan atau keberhasilan referendum. Pemerintah Spanyol sangat menentang upaya kemerdekaan Catalunya dan telah mengambil tindakan keras untuk menghalangi referendum kemerdekaan. Meskipun mendapat banyak penolakan, pemerintah Catalunya masih bersikeras ingin memisahkan diri dari Spanyol hingga saat ini. Pemerintah Catalunya melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginannya ini, termasuk dengan menyalahgunakan kewenangan, oleh karena dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana dan apa saja yang dilakukan oleh Catalunya dalam upaya pemisahan dirinya dari Spanyol.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, yaitu “Bagaimana upaya protodiplomasi pemerintah Catalunya untuk memisahkan diri dari Spanyol?”.

¹⁰ Agus Widodo dan Henny Saptatia Drajadi N., *Keterlibatan Gerakan Separatisme dalam Upaya Kemerdekaan Catalonia dari Spanyol*, Journal of Terrorism Studies, Vol, 4, No, 1 (2022), Depok: Universitas Indonesia, hal. 2.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan tentang upaya protodiplomasi pemerintah Catalunya dalam memisahkan diri dari Spanyol.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian dalam skripsi ini mencakup :

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahak rujukan atau referensi pemikiran untuk mahasiswa Hubungan Internasional serta peneliti lainnya yang berkaitan dengan upaya protodiplomasi pemerintah Catalunya dalam memisahkan diri dari Spanyol. Dalam penelitian ini juga menyinggung beberapa faktor yang menjadi penyebab Catalunya gagal dalam memisahkan diri dari Spanyol.

2. Manfaat Praktis

Dengan ditulisnya studi ini, penulis berharap bahwa hasilnya dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, informasi dan referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya. Peneliti ingin menggunakan skripsi ini sebagai bahan utama ataupun tambahan dalam penelitian selanjutnya mengenai upaya protodiplomasi pemerintahan Catalunya dalam memisahkan diri dari Spanyol.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Upaya Protodiplomasi Pemerintah Catalunya dalam Referendum Pemisahan Diri dari Spanyol, penulis mengambil beberapa sumber literatur sebagai acuan dari penelitian ini, Literatur pertama adalah jurnal tulisan Mochamad Ardhi Ma'arif, Wisnu Aryo Dewanto, dan Muhammad Insan Tarigan yang berjudul "Rencana Pemisahan catalonia dari Spanyol Ditinjau dari Prinsip *Self-Determination*". Prinsip kemandirian atau *Self-Determination* dalam hukum internasional dibahas dalam jurnal tersebut utamanya mengenai upaya Catalunya untuk memisahkan diri dari Spanyol. Peneliti melihat beberapa aspek, seperti undang-undang, konsep dan kasus dan kemudian menyimpulkan bahwa referendum adalah cara terbaik Catalonia untuk memisahkan diri, sesuai dengan prinsip kemandirian atau *self-determination*. Penulis menyatakan bahwa upaya referendum ini merupakan cara bagi masyarakat Catalonia untuk menyatakan opini. Sesuai dengan prinsip *Self-Determination* bahwa hak untuk memisahkan diri tidak terbatas pada situasi dekolonisasi saja, namun juga bisa diakibatkan oleh suatu keadaan khusus. Ketika pemerintah yang berdaulat menghalangi hak bangsa atau kawasan bagiannya baik dalam status sosial, budaya, politik, dan ekonomi, maka jalan terakhir yang diijinkan oleh hukum internasional adalah merdeka. Dalam kasus referendum Catalonia, *self-determination* melibatkan elemen sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Terakhir, Catalonia harus diakui secara internasional.

Penulis menjelaskan secara rinci berdasarkan pada teori dan prinsip yang digunakan. *Self-determination* sendiri merupakan suatu konsep dimana jika suatu bagian negara atau bangsa ingin memisahkan diri dari negara maka harus

memenuhi persyaratan dari berbagai aspek. Dalam kasus Catalunya ini, penulis membahas setiap aspek yaitu aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, wilayah, aspek penduduk, pemerintah berdaulat, dan kemampuan untuk melakukan diplomasi kemudian dihubungkan dengan pemerintahan Catalunya. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa Catalunya mampu memenuhi hampir seluruh aspek yang menjadi syarat suatu wilayah melakukan referendum.

Literatur berikutnya adalah jurnal tulisan Ignatius Hubert, Windy Dermawan dan Akim dengan judul *Catalan Identity and Paradiplomacy Strategy in Catalonia's Independence Movement* dengan menganalisis identitas Catalan serta konflik dengan pemerintah Spanyol yang dianggap berdampak pada strategi paradiplomasi di wilayah tersebut.¹¹ Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Catalunya merupakan salah satu wilayah otonom Spanyol yang berbeda dari daerah lain karena memiliki bahasa, sejarah, dan kebudayaan yang khas. Gerakan memperjuangkan kemerdekaan oleh Catalunya yang berpuncak pada tanggal 1 Oktober 2017 dilakukan untuk melindungi identitas Catalunya dengan didukung oleh sebagian besar masyarakat Catalan yang memilih untuk merdeka dari Spanyol. Semenjak gerakan ini menjadi perhatian global, proses referendum di Catalunya telah mengalami banyak perubahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh orang-orang Catalan untuk mendapat dukungan dari masyarakat internasional yaitu dengan melakukan aktivitas paradiplomasi.

Tulisan ini menjelaskan bahwa upaya paradiplomasi yang dilakukan masyarakat Catalunya bertujuan untuk melindungi identitas orang Catalan yang

¹¹ Ignatius Hubert, Windy Dermawan dan Akim Akim, *Catalan Identity and Paradiplomacy Strategy in Catalonia's Independence Movement*, Jurnal Politik Internasional, Vol, 22 No, 2 (2020), Bandung: Universitas Padjadjaran, hal. 1.

akhirnya membawa konflik internal Catalunya dan Spanyol lebih dinamis dan kompleks. Peneliti menemukan bahwa hal ini memiliki makna besar untuk menyelesaikan berbagai konflik internal yang sama, terutama yang berkaitan dengan identitas dan paradiplomasi. Upaya paradiplomasi ini menjadi suatu dilema bagi Catalunya dan pemerintahan Spanyol sendiri, di satu sisi rakyat Catalunya ingin melindungi identitas masyarakatnya dengan mendirikan negara sendiri, namun ditolak pemerintah Spanyol karena dianggap bahwa sifat pergerakannya berpotensi merugikan kepentingan nasional Spanyol.

Acuan literatur ketiga yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah jurnal karya Agus Widodo dan Henny Saptatia Drajadi Nugrahani yang berjudul “keterlibatan Gerakan Separatisme dalam Upaya Kemerdekaan Catalonia dari Spanyol”.¹² Penelitian ini membahas beberapa faktor penyebab gerakan separatisme tidak berhasil memisahkan Catalonia dari Spanyol, juga menjelaskan cara pemerintah Spanyol mempertahankan catalonia sebagai wilayah otonom. Masyarakat Catalonia yang terlibat dalam pemungutan suara untuk referendum tidak lebih dari 50% dari total keseluruhan. Faktor tambahan adalah upaya Uni Eropa untuk menolak separatisme di Catalunya dan mendorong wilayah otonom untuk bergabung. Temuan kedua didasarkan pada analisis tentang bagaimana pemerintah Spanyol berhasil menerapkan strategi pertahanan keamanan dengan membubarkan parlemen Catalonia, pengambilalihan pemerintah otonom Catalonia, dan mengadakan pemilu untuk pemilihan parlemen baru.

¹² Agus Widodo dan Henny Saptatia Drajadi N., *Keterlibatan Gerakan Separatisme dalam Upaya Kemerdekaan Catalonia dari Spanyol*, Journal of Terrorism Studies, Vol, 4, No, 1 (2022), Depok: Universitas Indonesia, hal. 1.

Keempat adalah skripsi dari Rizal Makbul dengan judul “Strategi Catalonia dalam Upaya Melepaskan Diri Dari Kerajaan Spanyol (Studi Kasus 2008-2015)”¹³. Latar Belakang penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Catalonia menggunakan berbagai strategi untuk memisahkan diri dari Spanyol melalui diplomasi klub sepak bola Barcelona, diaspora dan referendum. Setelah berhasil mengadakan referendum dua kali pada tahun 2014 dan 2017, pemerintah Catalonia bernegosiasi mengenai legalitas referendum tersebut. Pemerintah terus mengusahakan negosiasi dengan pemerintahan pusat sampai mencapai tujuan mereka. Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat Catalan untuk memisahkan diri dari Spanyol serta hambatan yang dihadapi oleh mereka.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan strategi pemerintah Catalonia untuk melepaskan diri lebih cenderung pada pemanfaatan club bola. Dalam proses meraih kemerdekaan dari negara Spanyol, pemerintah Catalonia telah menyusun beberapa strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi tersebut dianggap akan mampu melepaskan mereka dari negara Spanyol. Strategi- strategi ini telah mereka rancang dan dijalankan untuk melancarkan usaha mereka dalam meraih kemerdekaan. Adapun beberapa strategi yang telah mereka susun adalah menyebarkan nasionalisme mereka melalui Referendum, memanfaatkan klub sepakbola mereka dalam penyebaran nasionalisme melalui FC Barcelona dan Tim Sepakbola Nasional, dan penyebaran melalui diaspora. Penyebaran nasionalisme melalui klub sepakbola FC Barcelona dan Tim Nasional dilakukan pada saat

¹³ Rizal Makbul, 2017, *Strategi Catalonia dalam Upaya Melepaskan Diri Dari Kerajaan Spanyol (Stdi Kasus 2008-2015)*, Skripsi, Bandung: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia, hal. 1.

pertandingan. Dimana terdapat baner atau tulisan-tulisan yang merepresentatifkan kemerdekaan mereka dan perlawanan.

Acuan literatur kelima sekaligus yang terakhir yaitu tesis yang ditulis oleh Fleur Schepers berjudul *The Catalan Nationalist Movement and The Idea of 'Europe of the regions' : a Way to Bypass the Nation State?* Dalam *The Role of Regions in the European Union*.¹⁴ Dalam tulisan ini dibahas mengenai konsep “Eropa dari Kawasan” yang mengacu pada gagasan otoritas regional dan lokal menjadi salah satu aktor utama dalam Uni Eropa dengan prinsip hidup berdampingan. Penelitian ini menyelidiki perdebatan tersebut melalui ide ‘Europe of The Region’. Konsep ‘Europe of The Region’ merupakan sebuah ide dimana kawasan atau daerah menginginkan kedudukan yang setara dengan negara bangsa. Jika ditinjau berdasarkan pandangan yang lebih radikal, ide ini bisa merugikan negara. Gerakan nasionalis Catalan mungkin saja didasari oleh ide tersebut. Seperti yang sudah dideklarasikan nasionalis Catalan pada 2017 yang mengharapkan dukungan UE untuk merdeka dan mendirikan otonom sendiri.

Kawasan Uni Eropa berkembang secara bertahap dari kawasan ekonomi menjadi aktor politik, yang menghasilkan pembentukan Komite Daerah pada tahun 1994. Gerakan nasionalis Catalan memang melihat UE sebagai ‘jendela peluang’, dimana kawasan berharap untuk membentuk perwakilan langsung dengan kekuasaan legislatif di UE. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep ‘Eropa Kawasan’ dan ‘Eropa Bangsa-Bangsa’ memberikan kerangka tersendiri dalam menjelaskan peran kawasan dalam Uni Eropa. Kesimpulannya,

¹⁴ Fleur Schepers, 2018, *The Catalan Nationalist Movement and the Idea of “Europe of the Regions” : a way to bypass the nation state?*, Tesis, Utrecht: MA International Relations in Historical Perspective, Utrecht University Nederlands, hal. 1.

‘wilayah Eropa’ telah memberdayakan kaum nasionalis Catalan gerakan dalam mencapai otonomi yang lebih besar, menghasilkan situasi saat ini yang menjadi tuntutan kemerdekaan dari Spanyol.

Dari kelima literatur tersebut membahas mengenai peran Uni Eropa serta responnya dalam menanggapi referendum catalunya dari Spanyol. Dari beberapa temuan berdasarkan literatur di atas ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan Catalunya untuk memisahkan diri, begitupula mengenai penolakan dari pihak pemerintah Spanyol dan Uni Eropa yang menganggap bahwa otonomi daerah atau wilayah bagian negara berdaulat tidak bisa menjadi bagian Uni Eropa yang berdiri secara independen berdasarkan hukum. Gerakan masyarakat, upaya partai politik sampai gerakan separatis terlibat dalam upaya pemisahan diri Catalunya dari Spanyol. Hingga saat ini Catalunya masih berusaha mencapai kemerdekaan namun dinyatakan gagal.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Judul dan Nama Penulis	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1	Mochamad Ardhi Ma'arif, dkk. Judul: Rencana Pemisahan Catalonia dari Spanyol Ditinjau dari Prinsip Self-Determination	Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan eksplanatif dengan alat analisis hukum yuridis normatif	Dalam penelitian ini, membahas mengenai permasalahan Catalonia dalam upaya pemisahan diri dari Spanyol ditinjau menggunakan konsep <i>self-determination</i> dalam hukum internasional. Penulis menjelaskan bahwa, sesuai dengan konsep tersebut referendum masyarakat Catalan berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pendapat tentang perbedaan identitas dan tuntutan atas hak-hak mereka. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa mengambil jalan referendum adalah cara terbaik

No	Judul dan Nama Penulis	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
			untuk Catalonia memisahkan diri berdasarkan prinsip kemandirian.
2	Ignatius Hubert, dkk. Judul: Catalan Identity and Paradiplomacy Strategy in Catalonia's Independence Movement	Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur dengan menggunakan teori studi identitas dan paradiplomasi.	Peneliti dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana masyarakat Catalunya melakukan upaya paradiplomasi untuk melindungi identitas orang Catalan yang kemudian menyebabkan konflik internal dengan pemerintah pusat lebih kompleks. Upaya paradiplomasi ini menjadi suatu dilema bagi Catalunya dan pemerintahan Spanyol sendiri, di satu sisi rakyat Catalunya ingin melindungi identitas masyarakatnya dengan mendirikan negara sendiri, namun ditolak pemerintah Spanyol karena dianggap bahwa sifat pergerakannya berpotensi merugikan kepentingan nasional Spanyol.
3	Agus Widodo dan Henny Saptia Draji Nugrahani dengan judul Keterlibatan Gerakan Separatisme dalam Upaya Kemerdekaan Catalonia dari Spanyol	Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis dengan teori separatisme dan sekuritisasi	Dalam studi ini ada dua temuan, yang pertama, masyarakat Catalonia menjadi faktor paling penting terhadap kegagalan separatisme dalam memerdekakan Catalunya. Pemilih yang terlibat berjumlah tidak lebih dari 50%. Faktor tambahan adalah upaya Uni Eropa untuk menolak separatisme di Catalunya dan mendorong wilayah otonom untuk bergabung. Analisis menunjukkan bahwa pemerintah Spanyol berhasil menggunakan strategi pertahanan keamanan dengan membubarkan parlemen Catalonia, mengambil alih

No	Judul dan Nama Penulis	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
			pemerintahan Catalunya, dan membentuk parlemen baru
4	Rizal Makbul dengan judul Strategi Catalonia dalam Upaya Melepaskan Diri Dari Kerajaan Spanyol (Studi Kasus 2008-2015)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lat analisa teori diplomasi	Studi ini melihat bagaimana orang Catalan berusaha memisahkan wilayahnya dari Spanyol dengan diplomasi melalui beberapa upaya seperti klub sepak bola, diaspora dan referendum. Peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah Catalonia untuk merdeka cenderung pada pemanfaatan club bola, dimana penyebaran nasionalisme dilakukan pada saat pertandingan FC Barcelona melalui banner atau tulisan-tulisan yang merepresentasikan kemerdekaan dan perlawanan.
5	Fleur Schepers dengan judul Catalan Nationalist Movement and The Idea of 'Europe of the regions' : a Way to Bypass the Nation State?	Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat analisa teori organisasi internasional	Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa konsep 'Eropa Kawasan' dan 'Eropa Bangsa-Bangsa' memberikan kerangka tersendiri dalam menjelaskan peran kawasan dalam Uni Eropa. Tesis ini berkontribusi dalam perdebatan antara kedaulatan Eropa dari atas dan Otonomi ke bawah yang merupakan ancaman bagi otoritas negara bangsa. Penelitian ini menyelidiki perdebatan tersebut melalui ide 'Europe of The Region'. Konsep 'Europe of The Region' merupakan sebuah ide dimana kawasan atau daerah menginginkan kedudukan yang setara dengan negara bangsa. Jika ditinjau berdasarkan pandangan yang lebih radikal, ide ini bisa merugikan negara. Gerakan nasionalis Catalan

No	Judul dan Nama Penulis	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
			mungkin saja didasari oleh ide tersebut. Pada awal pendirian wilayah Uni Eropa, kekuasaan terpusat. Namun sejak tahun 1980, untuk meningkatkan perekonomian, otoritas UE memberikan wewenang untuk aktor regional. Peran daerah diharapkan bisa menciptakan hubungan timbal balik dengan otoritas pusat.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Protodiplomasi

Konsep Paradiplomasi yang dikemukakan Panavotis Soldatos dan dikembangkan oleh Ivo Duchacek menjadi sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan hubungan internasional oleh aktor sub nasional. Paradiplomasi didefinisikan sebagai upaya entitas sub-negara untuk melakukan hubungan diplomatik dengan mitra asing. Akibatnya, aktor sub-nasional mulai berpartisipasi dalam kegiatan hubungan internasional dan negara bukan satu-satunya aktor yang ada. Aktor sub-nasional menjalin hubungan internasional karena berbentuk otonomi dan lebih mudah mengutamakan kepentingan regional daripada kepentingan nasional.

Konsep *protodiplomacy* sebenarnya merupakan teori konsep turunan dari paradiplomasi. Konsep ini berasal dari kebijakan paradiplomasi nasional yang salah, yang memungkinkan pemerintah regional melakukan hal-hal yang dapat mengganggu atau bahkan mengancam kepentingan nasional. Untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan, pemerintah regional dapat menjalin hubungan luar negeri. Menurut Noe Cornago, disebut sebagai "Protodiplomasi" karena merupakan

paradilomasi yang digunakan oleh pemerintah otonom untuk mendorong *secessionisme* atau pemisahan diri.¹⁵ Paradiplomasi pada dasarnya adalah instrumen pembangunan, namun juga berdampak buruk ketika dijadikan sebagai instrumen penguatan identitas etno-nasionalisme. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun politik paradiplomasi nasional dengan hati-hati. Menurut Crikemens, kemampuan untuk melakukan paradiplomasi dapat menghasilkan hubungan yang baik dan buruk. Hubungan dengan kelompok radikal nasionalis dapat memicu konflik.¹⁶ Seperti di Catalonia sendiri manajemen paradiplomasi bisa berubah karena daerah ini memiliki gerakan separatis, sehingga dalam sistem federalnya peraturan regional tentang urusan paradiplomasi mengalami perubahan.¹⁷ Menurut Cornago, protodiplomasi sendiri jarang membuahkan hasil yang diharapkan oleh pendukungnya, seperti halnya dalam mendapat dukungan internasional yang signifikan terhadap proses pemisahan diri, dan lebih besar kemungkinannya untuk menimbulkan isolasi internasional dan konflik etnopolitik yang menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan politik.¹⁸

Der Derian (1987) menyatakan bahwa protodiplomasi pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan paradiplomasi. Protodiplomasi biasanya dilakukan oleh subunit politik negara berdaulat, namun juga bisa dilakukan oleh kelompok nasionalis ataupun entitas lain yang tidak memiliki kehadiran teritorial

¹⁵ Takdir Ali Mukti, 2020, *Politik Paradiplomasi dan isu Kedaulatan di Indonesia*, Yogyakarta: The Phinisi Press, hal. 3.

¹⁶ D Crikemens, 2006, *How Subnational Entities Try to Develop Their Own paradiplomacy. The case of Flanders (1993-2005)*, International Conference, Challenges for Foreign Ministries : Managing Dilomatic Networks and Optimising Value, May 31 – June 1 2006, University of Antwerp Belgium.

¹⁷ Takdir Ali Mukti, 2020, *Politik Paradiplomasi dan isu Kedaulatan di Indonesia*, Yogyakarta: The Phinisi Press, hal. 17-18.

¹⁸ Noe Cornago, 2018, *Paradiplomacy and Protodiplomacy*, Gordon Martel Encyclopedia of Diplomacy, hal. 2.

formal di suatu negara. Tujuan dari protodiplomasi yaitu mencari legitimasi internasional bagi unit atau masyarakat yang diwakili. Oleh karena itu, prinsip protodiplomasi berkaitan dengan kegiatan promosi dan pengakuan budaya nasional.¹⁹ Konsep protodiplomasi menurut Der Derian digunakan sebagai acuan teori oleh penulis untuk menjelaskan bagaimana upaya protodiplomasi pemerintah Catalunya dalam memisahkan diri dari Spanyol berdasarkan empat aspek meliputi:

1. *Conducted by political subunits of sovereign states*

Protodiplomasi dilakukan oleh subunit politik negara berdaulat yang mengacu pada interaksi diplomatik yang dilakukan oleh entitas regional atau subnasional dalam negara berdaulat dan bukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, subunit negara mencakup negara bagian, provinsi, teritori atau daerah otonom dalam suatu negara.

2. *Pursued by nationalist groups and other entities*

Kelompok nasionalis dan entitas lain yang tidak memiliki teritorial formal di suatu negara juga bisa disebut bagian dari protodiplomasi apabila mengacu pada upaya dan aktivitas diplomatik yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang berupaya mencapai tujuan politik atau kepentingan mereka tanpa memiliki kendali atas wilayah tertentu. Kelompok ini mencakup NGO, komunitas diaspora, kelompok separatis dan lain sebagainya.

3. *Seeks international legitimacy*

¹⁹ James Der Darian, 1987. *On diplomacy: A genealogy of western estrangement*. Oxford: Basil Blackwell.

Tujuan utama dari dilakukannya protodiplomasi adalah untuk mendapatkan pengakuan, validasi dan juga dukungan dari komunitas internasional. Suatu negara atau wilayah yang melakukan protodiplomasi mencari dukungan untuk membantu proses pemisahan diri atau kemerdekaan. Protodiplomasi sering kali merujuk pada upaya-upaya yang berbeda dengan sistem diplomatik yang sudah ada, hal ini mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau wilayah bagian yang belum diakui sebagai negara berdaulat atau tidak memiliki status diplomatik resmi.

4. *Cultural and national promotion and recognition activity*

Strategi diplomatik yang melibatkan promosi budaya digunakan oleh kelompok atau entitas untuk memajukan dan memvalidasi identitas budaya, aspirasi nasional atau pengakuan masyarakat internasional. Bentuk protodiplomasi ini berfokus pada promosi identitas budaya, nasional atau etnis kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan, pengakuan dan legitimasi dari komunitas internasional.

Penelitian ini ditulis menggunakan konsep *protodiplomacy* untuk menjelaskan perilaku Pemerintah Catalonia yang memanfaatkan *Statue 2006* dengan menerbitkan kebijakan berupa *Foreign Action Plan (FAP)* sebagai alat untuk melakukan upaya pemisahan diri yang didukung oleh beberapa elemen yaitu pembentukan jaringan dan hubungan (*networking*), keterlibatan dan pemanfaatan aktor non-negara seperti partai politik nasionalis Catalan, club bola FC Barcelona, dan gerakan masyarakat Catalan yang pro-kemerdekaan, serta

penggunaan teknologi dan media sosial sebagai media propaganda dari pemerintah Catalunya untuk mendorong referendum pemisahan diri dari Spanyol.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode/Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebuah variabel atau lebih dan diolah secara holistik. Metode ini digunakan untuk menganalisa upaya protodiplomasi pemerintah Catalunya dalam proses referendum pemisahan diri dari Spanyol dengan lebih mendalam.²⁰

1.6.2 Teknik Analisis Data

Pendekatan deduktif secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan literatur sebagai referensi dan sumber data serta informasi ataupun data lainnya sesuai dengan topik yang akan dibahas. Data yang diambil akan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti agar tetap relevan kemudian disusun secara sistematis menggunakan teori sebagai alat analisis sehingga bisa mencapai hasil dan kesimpulan penelitian yang diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Suriasumantri, penalaran deduktif adalah cara berpikir dimana kesimpulan khusus ditarik dari pernyataan umum. Analisis data secara kualitatif dapat berupa

²⁰ Rusnadi dan M. Rusli, *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*, Makassar: Dinas Pendidikan Luwu Timur.

keabsahan data yang didasari oleh kriteria tertentu yakni kredibilitas, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.²¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga data dikumpulkan dari sumber buku, website, jurnal artikel, artikel online, skripsi, portal berita resmi yang berkaitan dengan upaya protodiplomasi pemerintah Catalunya dalam referendum pemisahan diri dari Spanyol.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan serangkaian peristiwa yang menjelaskan berbagai upaya Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol selama dua periode pemerintahan, dimulai dari masa pemerintahan Artur Mas hingga pemerintahan Carles Puigdemont. Upaya kemerdekaan Catalonia sudah terjadi sejak lama, namun puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Artur Mas dimana pelembagaan paradiplomasi Catalonia mengalami perubahan yang signifikan dengan dibentuknya *Regional Ministry of Foreign Affair* dan beberapa lembaga lainnya yang mengatur soal urusan luar negeri pada tahun 2013 dan 2014 melalui keputusan presiden.²² *Foreign Action Plan* dijadikan sebagai rumusan kebijakan luar negeri dengan otoritas penuh dari pemerintahan Catalonia saat itu. Disamping itu juga terjadi dukungan besar-besaran dari masyarakat melalui Referendum 2015 dan 2017. Permasalahan ini berlanjut hingga pemerintahan Carles Puigdemont dan semakin rumit terutama

²¹ Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *ALHADHARAH JURNAL ILMU DAKWAH* 17(33):81 (2019).

²² Takdir Ali Mukti, 2017, *Paradiplomacy dan Konflik Hukum di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 91

setelah terjadi referendum 2017 dan Carles Puigdemont melarikan diri ke Belgia dan kemudian ditangkap oleh otoritas Italia pada 2021. Oleh karena itu, penulis membatasi *Timeline* penelitian ini dari tahun 2013-2021.

1.7 Argumen Pokok

Penulis memberikan argumen pokok mengenai upaya protodiplomasi pemerintah Catalunya dalam memisahkan diri dari Spanyol dilakukan dengan berbagai langkah dan pendekatan. Pasca penerbitan dekret presiden Catalonia dengan dasar *The Statute* 2006, pemerintah Catalunya menetapkan FAP atau *Foreign Action Plan* pertamanya tahun 2010-2015 sebagai alat untuk melakukan pemisahan diri. FAP ini telah dilakukan dua tahap yaitu dari tahun 2010-2015 kemudian diperpanjang dari 2015-2020. FAP menjadi “pedoman” pemerintah Catalunya untuk memisahkan diri dengan melakukan upaya referendum dan mencari pengakuan diplomatik. Berdasarkan teori protodiplomasi mengenai jaringan dan hubungan, pemerintah Catalunya berusaha untuk membangun hubungan antara aktor-aktor yang terlibat, pemerintah otonom termasuk dalam entitas non-negara sehingga kemungkinan menjalin hubungan dengan aktor negara di Uni Eropa untuk mencapai tujuannya dan mendapat dukungan dari entitas yang lebih besar kekuatannya. Upaya lainnya mungkin saja dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan partai-partai lain yang pro-kemerdekaan. Media sosial juga tidak luput menjadi sarana kampanye dengan jangkauan lebih luas dan cepat, dengan melakukan kampanye publik Catalonia berharap bisa mendapat simpati dari masyarakat global. Dalam hal ini, Uni Eropa memiliki peran besar untuk menentukan dukungan kepada Catalunya, disamping itu pasti ada negara yang pro kemerdekaan, namun ada juga yang menolak. Melihat pemerintah Spanyol sendiri yang menolak

keras referendum ini dan menganggapnya keputusan yang ilegal maka kegagalan pemisahan diri Catalunya dari Spanyol tidak bisa dipungkiri.

1.8 Sistematika Penulisan

<p>BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori 1.5.1 Teori konsep protodiplomasi dan paradiplomasi 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Metode/ Tipe penelitian 1.6.2 Teknik Analisis Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II Relasi Pusat-Daerah dalam Pemerintahan Spanyol</p>	<p>2.1 Sistem Pemerintahan Spanyol 2.2 Sistem Pemerintahan Daerah dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat</p>
<p>BAB III Protodiplomasi Catalonia</p>	<p>3.1 <i>Foreign Action Plan</i> (FAP) 2010-2015 3.1.1 Upaya mencari dukungan Eksternal 3.1.2 Referendum Catalonia 2015 3.2 <i>Foreign Action Plan</i> (FAP) 2015-2020 3.2.1 Upaya mencari dukungan Eksternal 3.2.2 Referendum Catalonia 2017 3.3 Analisis Upaya Protodiplomasi Catalonia berdasarkan teori Der Darian (1987) 3.3.1 Protodiplomasi oleh aktor negara (<i>State actor</i>) 3.3.2 Keterlibatan dan dukungan internal oleh <i>non-state actor</i></p>
<p>BAB IV</p>	<p>PENUTUP 5.1 Kesimpulan 5.2 Saran</p>